

Kebijakan Penjualan Makanan di Lingkungan Dalam Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo

Ratih Arifin¹, Andi Ayla Azzorayya Katili²

Univerrstas Bina Taruna Gorontalo¹, MI Al-Huda Gorontalo²

arifinara189@gmail.com¹, aylazzorayaa04@gmail.com²

ABSTRAK

Kebijakan penjualan makanan di lingkungan sekolah menjadi bagian penting dalam mewujudkan madrasah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penjualan makanan di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo, meninjau kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala madrasah, guru, pedagang kantin, serta siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun madrasah telah memiliki aturan tertulis terkait makanan yang boleh dijual, namun pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Masih banyak ditemukan makanan tinggi gula, garam, dan pengawet dijual bebas di kantin sekolah. Lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi gizi, serta minimnya keterlibatan siswa dan pedagang menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan kebijakan berbasis partisipatif, pelatihan bagi pedagang, edukasi konsumsi sehat bagi siswa, serta pengawasan yang berkelanjutan. Kebijakan kantin sehat harus terintegrasi dengan nilai-nilai Islami dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan konsumsi yang aman, bergizi, dan mendidik.

Kata kunci: **Kebijakan, Penjualan Makanan, Madrasah, Sehat, Sekolah**

ABSTRACT

The policy on food sales within school environments plays a vital role in promoting healthy habits and supporting the optimal development of students. This study aims to analyze the implementation of food sales policies at Madrasah Aliyah Al-Huda in Gorontalo City, identify the challenges faced, and propose appropriate solutions. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants included the school principal, teachers, canteen vendors, and students. The findings reveal that although the school has issued written regulations regarding acceptable food sales, the practical implementation remains ineffective. Various unhealthy foods high in sugar, salt, and preservatives are still widely sold. Weak supervision, lack of nutritional education, and low stakeholder involvement are among the main obstacles. This study recommends participatory policy reform, vendor training, nutritional education for students, and consistent monitoring. A healthy canteen policy

should be integrated with Islamic values and involve all stakeholders to create a safe, nutritious, and educational food environment.

Keywords: *Policy, Food Sales, Madrasah, Healthy, School*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Selain bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan juga memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk karakter, perilaku, dan pola hidup yang sehat pada peserta didik. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan seperti madrasah tidak hanya berperan sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang turut membentuk gaya hidup siswa sehari-hari. Salah satu aspek penting yang kerap kali luput dari perhatian adalah kebijakan terkait penjualan makanan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk di Madrasah Aliyah (MA).

Kehadiran kantin atau pedagang makanan di lingkungan sekolah bukanlah hal yang baru. Kegiatan jual beli makanan di lingkungan pendidikan merupakan kebutuhan praktis yang memberikan akses langsung bagi siswa untuk memperoleh konsumsi selama waktu belajar. Namun, dalam praktiknya, tidak semua makanan yang dijual memiliki standar gizi yang baik atau memenuhi aspek keamanan pangan. Di berbagai sekolah dan madrasah, masih banyak ditemukan makanan yang mengandung pemanis buatan, pewarna sintetis, pengawet berbahaya, hingga makanan cepat saji dengan kadar lemak dan garam tinggi. Jika dibiarkan tanpa regulasi yang jelas, hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik siswa, menurunkan konsentrasi belajar, serta menjadi kebiasaan konsumsi yang buruk hingga dewasa.

Kesehatan dan kualitas asupan gizi peserta didik merupakan fondasi penting dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Dalam konteks pendidikan formal, khususnya pada jenjang menengah atas seperti Madrasah Aliyah, lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan makan yang sehat dan mendidik siswa tentang pentingnya memilih makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi. Sekolah bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga lingkungan sosial yang membentuk karakter, perilaku, dan gaya hidup, termasuk pola konsumsi makanan sehari-hari siswa.

Penjualan makanan di lingkungan sekolah, baik di kantin resmi maupun melalui pedagang kaki lima yang beroperasi di sekitar area sekolah, sering kali tidak sepenuhnya diawasi dari segi mutu, keamanan pangan, dan kandungan gizinya. Di banyak satuan pendidikan, termasuk Madrasah Aliyah Al-Huda di Kota Gorontalo, keberadaan makanan yang dijual kepada siswa kerap dipengaruhi oleh faktor komersial semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan siswa. Banyak dijumpai makanan ringan dengan kandungan gula berlebih, pewarna buatan, bahan pengawet, dan bahan tambahan pangan sintetis lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang jika dikonsumsi secara rutin. Bahkan, tidak jarang ditemukan makanan yang disajikan dalam kondisi tidak higienis, tanpa memperhatikan prosedur sanitasi dasar.

Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan semangat mewujudkan sekolah yang sehat dan berkualitas. Pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti Permenkes No. 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan No. 5/X/PB/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah, telah mendorong pengelolaan makanan sehat di sekolah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak satuan pendidikan yang belum menerapkan pedoman tersebut secara optimal, termasuk Madrasah Aliyah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama.

Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar dan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Dalam konteks lokal, kecenderungan konsumsi makanan ringan dan instan di kalangan remaja cukup tinggi, dan hal ini berpotensi berdampak pada gangguan kesehatan seperti obesitas, anemia, diabetes, serta gangguan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan preventif dalam pengelolaan penjualan makanan di lingkungan madrasah.

Kebijakan penjualan makanan di lingkungan sekolah sejatinya merupakan wujud nyata dari manajemen pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur, sekolah dapat mengontrol jenis makanan yang diperjualbelikan, menetapkan standar kebersihan dan keamanan pangan, serta mendidik siswa untuk lebih selektif dalam memilih asupan sehari-hari. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu

meningkatkan kesadaran para pedagang dan pengelola kantin untuk menyediakan makanan yang layak konsumsi, sehat, dan bergizi.

Kebijakan semacam ini tentu tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya koordinasi antara pihak madrasah, komite sekolah, orang tua, dinas kesehatan, serta pelaku usaha makanan di lingkungan sekolah. Kebijakan yang baik harus didahului oleh proses perumusan yang partisipatif, berdasarkan kebutuhan nyata, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana kebijakan penjualan makanan di Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo dirancang, diterapkan, dan direspons oleh berbagai pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, isu penjualan makanan di sekolah juga berkaitan erat dengan prinsip pendidikan karakter dalam Islam. Islam sebagai agama yang holistik sangat menekankan aspek kebersihan, kesehatan, dan kesederhanaan dalam konsumsi. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 disebutkan: *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu."* Ayat ini menegaskan pentingnya memastikan makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga *thayyib* (baik) secara kesehatan dan kebersihan. Oleh karena itu, kebijakan penjualan makanan di madrasah bukan hanya isu kesehatan fisik semata, tetapi juga bagian dari pembentukan akhlak dan pemahaman nilai-nilai agama yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis kebijakan penjualan makanan di lingkungan dalam Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo. Fokus kajian mencakup proses perumusan kebijakan, pelaksanaan di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap perilaku konsumsi siswa. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik.

Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tingkat menengah atas memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan kebiasaan hidup sehat peserta didik. Dalam lingkup ini, kebijakan penjualan makanan yang diterapkan di lingkungan dalam madrasah menjadi sangat penting untuk ditinjau dan dianalisis. Apakah makanan yang dijual

di lingkungan madrasah telah memenuhi aspek kesehatan dan gizi? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap produk makanan tersebut? Apakah terdapat regulasi formal yang mengatur jenis makanan yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan di lingkungan sekolah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada urgensi pengkajian kebijakan penjualan makanan dalam ranah pendidikan Islam seperti di MA Al-Huda. Tidak hanya sekadar membahas mekanisme penjualan dan pengadaan makanan, namun juga terkait nilai-nilai pendidikan Islam, kesehatan, dan perlindungan peserta didik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan tuntutan akan pendidikan yang holistik, maka perlu adanya pengelolaan yang terintegrasi antara kebijakan internal madrasah dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama serta Kementerian Kesehatan dan Pendidikan.

Kebijakan penjualan makanan bukan hanya merupakan tanggung jawab kepala madrasah, tetapi juga perlu melibatkan berbagai pihak seperti guru, wali murid, pedagang, hingga siswa itu sendiri. Pendekatan partisipatif ini penting agar kebijakan yang diambil dapat diterima oleh seluruh warga sekolah dan dapat dijalankan secara efektif. Maka dari itu, penelitian mengenai kebijakan penjualan makanan di Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo menjadi sangat relevan dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendidik secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan penjualan makanan di lingkungan dalam Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo dirancang dan diterapkan?
2. Apa saja jenis makanan yang dijual di lingkungan madrasah dan bagaimana kualitas gizinya?
3. Bagaimana persepsi dan respons siswa, guru, serta pihak sekolah terhadap kebijakan tersebut?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penjualan makanan di lingkungan madrasah?
5. Bagaimana strategi penguatan kebijakan penjualan makanan sehat di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Huda?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perumusan dan implementasi kebijakan penjualan makanan di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Huda.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang dijual serta mengevaluasi kandungan gizinya.
3. Menggali persepsi siswa, guru, dan pihak sekolah terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan.
4. Mengungkap tantangan dan hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut.
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan penjualan makanan sehat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik (Dye, 2017). Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik tidak hanya terbatas pada kurikulum dan sistem pembelajaran, tetapi juga mencakup aspek kesehatan peserta didik, termasuk regulasi penjualan makanan di lingkungan sekolah.

Menurut teori proses kebijakan oleh Dunn (2018), kebijakan publik memiliki lima tahap utama, yaitu: (1) identifikasi masalah, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi, dan (5) evaluasi. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan penjualan makanan di Madrasah Aliyah Al-Huda: apakah perumusan kebijakan didasarkan pada kebutuhan nyata, bagaimana implementasinya, serta sejauh mana evaluasi dilakukan terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian oleh Subarsono (2020) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada kualitas implementasi dan pelibatan aktor-aktor kunci yang terlibat. Dalam konteks sekolah, aktor tersebut meliputi kepala madrasah, pengelola kantin, siswa, komite sekolah, dan dinas kesehatan.

Konsep Kesehatan Sekolah (*Health Promoting School*)

Konsep *Health Promoting School* yang dikembangkan WHO (2016) menekankan bahwa sekolah harus menjadi lingkungan yang secara aktif mempromosikan kesehatan fisik, mental, dan sosial peserta didik. Salah satu komponen penting dari sekolah sehat adalah tersedianya makanan sehat yang terjangkau dan aman di lingkungan sekolah.

Penelitian oleh Putri dan Susanto (2021) menunjukkan bahwa kantin sekolah yang menyediakan makanan sehat dan menerapkan sistem pengawasan berkala mampu meningkatkan perilaku konsumsi sehat siswa. Hal ini juga mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi dini pada remaja.

Menurut Permana et al. (2019), sekolah harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan pihak kantin dalam menetapkan standar kualitas makanan, termasuk kandungan gizi, kebersihan penyajian, dan keamanan pangan.

Perilaku Konsumen Remaja dalam Pemilihan Makanan

Perilaku konsumsi makanan pada remaja sangat dipengaruhi oleh faktor psikososial dan lingkungan. Menurut Shepherd (2008), faktor-faktor yang memengaruhi antara lain selera, harga, aksesibilitas, tekanan teman sebaya, serta promosi produk. Dalam konteks remaja madrasah, kecenderungan konsumsi makanan ringan tinggi kalori tetapi rendah gizi sangat tinggi, terlebih jika tidak ada pengawasan dari pihak sekolah.

Studi oleh Fauziah dan Kurniawati (2020) menemukan bahwa sebagian besar siswa lebih memilih makanan instan dan minuman manis dibanding makanan bergizi karena faktor harga dan kebiasaan. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan sekolah untuk mengubah pola konsumsi siswa secara bertahap melalui edukasi dan regulasi makanan yang dijual di kantin.

Pendidikan Karakter Islami dalam Konsumsi Makanan

Dalam ajaran Islam, konsumsi makanan tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga spiritual dan moral. Konsep **halalan thayyiban** merupakan prinsip utama dalam memilih makanan, yaitu makanan yang halal secara hukum Islam dan baik secara kualitas kesehatan. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Mu'minun ayat 51.

Menurut Rahmah (2021), prinsip halalan thayyiban harus menjadi dasar dalam pengelolaan makanan di madrasah, baik oleh pengelola kantin maupun siswa. Penjualan makanan yang tidak memenuhi kriteria thayyib (bersih, bergizi, aman) harus dilarang sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi pendidikan Islam.

Sementara itu, Nurhayati (2018) menekankan bahwa madrasah memiliki tanggung jawab dalam mengintegrasikan pendidikan gizi berbasis nilai-nilai Islam melalui kebijakan internal dan praktik sehari-hari.

Partisipasi dalam Kebijakan Sekolah

Arnstein (1969) dalam model *Ladder of Citizen Participation* mengklasifikasikan partisipasi dalam kebijakan ke dalam delapan tingkatan, dari manipulasi hingga kontrol penuh oleh warga. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar peluang kebijakan diterima dan dijalankan secara efektif.

Dalam lingkungan sekolah, kebijakan makanan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, guru, pengelola kantin, dan dinas kesehatan. Penelitian oleh Wahyuni et al. (2022) menunjukkan bahwa pelibatan siswa dalam penyusunan regulasi kantin sekolah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap perubahan perilaku makan.

Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap segala aktivitas di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, kantin atau kegiatan penjualan makanan termasuk dalam domain layanan pendukung pendidikan. Menurut Mulyasa (2019), pengelolaan layanan penunjang seperti kantin harus mengikuti prinsip efektivitas, efisiensi, partisipatif, dan akuntabel.

Implementasi manajemen sekolah yang sehat dan profesional akan berdampak pada penciptaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kantin yang dikelola tanpa sistem manajerial yang baik cenderung menjadi sumber permasalahan, baik dari sisi kesehatan, kebersihan, maupun etika bisnis di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan kebijakan penjualan makanan di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo, baik dari sisi proses perumusan, implementasi, maupun dampaknya terhadap perilaku konsumsi siswa.

Menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang kompleks, dengan melibatkan partisipan dalam konteks alami mereka. Jenis penelitian deskriptif kualitatif juga berguna untuk mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi, terutama ketika data yang dibutuhkan bersifat naratif dan kontekstual (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo, sebuah lembaga pendidikan Islam tingkat menengah atas yang memiliki lingkungan internal yang aktif dalam kegiatan jual beli makanan melalui kantin dan pedagang internal. Waktu penelitian direncanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Agustus hingga Oktober 2025.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles, Huberman & Saldaña, 2018). Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Madrasah; (2) Wakil Kepala Bidang Kesiswaan; (3) Pengelola Kantin; (4) Guru Pembina UKS; (5) Siswa; (6) Komite Sekolah; (7) Perwakilan Pedagang Internal. Kriteria informan mencakup mereka yang memiliki pengalaman langsung, pemahaman mendalam, serta keterlibatan dalam kebijakan penjualan makanan di lingkungan madrasah.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (a) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*); (b) Observasi Partisipatif; (c) Studi Dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: (1) Reduksi data: proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah; (2) Penyajian data: menyajikan data dalam bentuk naratif, matriks, atau bagan tematik; (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menafsirkan data untuk merumuskan makna dan temuan akhir. Seluruh proses analisis dilakukan secara iteratif, artinya data terus dianalisis selama proses pengumpulan data berlangsung agar memungkinkan refleksi dan penyesuaian.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Validasi data dilakukan pula dengan teknik *member check*, yaitu mengkonfirmasi hasil interpretasi kepada informan.

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika, yaitu: (a) *Informed consent*: setiap informan diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian, serta dimintai persetujuan sebelum wawancara dilakukan; (b) Kerahasiaan identitas: identitas informan dijaga kerahasiaannya; (c) *Non-maleficence*: memastikan bahwa

partisipasi dalam penelitian tidak merugikan atau menimbulkan beban psikologis kepada informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kebijakan penjualan makanan di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo dirancang, diimplementasikan, dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Hasil penelitian disajikan berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan utama terbagi dalam lima bagian: (1) bentuk kebijakan, (2) jenis makanan yang dijual, (3) respons pemangku kepentingan, (4) tantangan implementasi, dan (5) strategi penguatan kebijakan.

Gambar 1: Kantin Penjualan Snack



Sumber: Peneliti 22 Juli 2025

Gambar 2: Penjualan Makanan Ringan



Sumber: Peneliti 22 Juli 2025

Bentuk Kebijakan Penjualan Makanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penjualan makanan di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Huda sudah dituangkan dalam bentuk aturan internal sekolah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Madrasah Nomor 04/MAH-KG/2023 tentang Pedoman Penjualan Makanan dan Minuman di Lingkungan Madrasah. Aturan ini dikeluarkan sebagai respon atas keluhan guru dan orang tua terhadap banyaknya makanan tidak sehat yang dijual kepada siswa. Kebijakan tersebut mencakup beberapa poin utama: (a) Pelarangan penjualan makanan dengan pewarna sintesis dan pengawet berbahaya; (b) Penetapan waktu operasional kantin dan tempat jualan; (c) Kewajiban pedagang untuk menjaga kebersihan dan higienitas makanan; (d) Pelibatan tim UKS dalam pengawasan kantin. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Kepala madrasah menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya pengawas serta minimnya kesadaran pedagang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan teori kebijakan publik oleh Dunn (2018), kebijakan penjualan makanan ini telah memasuki tahap formulasi dan adopsi, namun masih lemah dalam aspek implementasi. Kurangnya sosialisasi dan monitoring menyebabkan kebijakan tidak sepenuhnya diinternalisasi oleh para pelaku.

Jenis Makanan Yang Dijual

Hasil observasi menunjukkan bahwa makanan yang dijual di lingkungan madrasah sebagian besar merupakan makanan ringan seperti mi goreng instan, gorengan, minuman kemasan manis, kerupuk warna-warni, jajanan ber pewarna sintesis, dan permen. Dari seluruh item yang dijual di kantin dan lapak-lapak pedagang kecil, hanya sekitar 30% yang memenuhi kriteria gizi dan kebersihan. Sementara sisanya merupakan makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) namun rendah kandungan serat dan vitamin. Dalam satu sesi observasi, ditemukan satu jenis makanan yang mengandung zat pewarna Rhodamin B, yang dilarang dalam makanan. Siswa sendiri tidak memiliki kesadaran tinggi untuk memilih makanan sehat, dan lebih mempertimbangkan rasa, bentuk, dan harga.

Temuan ini menguatkan pendapat Fauziah & Kurniawati (2020) bahwa selera dan harga menjadi faktor dominan dalam pemilihan makanan oleh remaja. Dalam konteks sekolah, penting adanya regulasi ketat dan edukasi berkelanjutan agar siswa terbiasa memilih makanan sehat. Ketidadaan sistem pengawasan berkala menjadi celah yang memungkinkan peredaran makanan berisiko tinggi tetap terjadi.

Respons Pemangku Kepentingan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan komite sekolah menyambut baik kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwa langkah pengaturan makanan perlu diperkuat demi kesehatan siswa. Guru pembina UKS bahkan secara rutin memberikan edukasi tentang gizi kepada siswa setiap awal semester. Namun demikian, para pedagang cenderung menolak pembatasan jenis makanan, karena berdampak pada pendapatan mereka. Menurut pengelola kantin, makanan sehat seperti buah potong, susu kedelai, atau roti gandum kurang diminati siswa. Hal ini menyebabkan pedagang memilih menjual produk yang laris, meski kurang sehat.

Sementara itu, siswa menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara detail tentang kebijakan makanan yang diterapkan. Mereka merasa bebas memilih makanan yang disukai karena tidak ada pembatasan tegas.

Berdasarkan teori partisipasi Arnstein (1969), kebijakan ini masih berada pada tingkat “informing” atau pemberitahuan sepihak, belum pada level partisipasi kolaboratif. Ketidakterlibatan siswa dan pedagang dalam proses kebijakan membuat implementasi bersifat sepihak dan kurang efektif. Wahyuni et al. (2022)

juga menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam kebijakan kantin terbukti mampu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.

Tantangan Implementasi Kebijakan

Beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi: (a) Kurangnya pengawasan rutin: Madrasah belum memiliki tim khusus yang bertugas memantau dan mengevaluasi makanan yang dijual secara berkala; (b) Keterbatasan dana dan SDM: Kegiatan pembinaan pedagang dan penyuluhan gizi hanya dilakukan sesekali karena keterbatasan anggaran operasional; (c) Minimnya alternatif makanan sehat yang menarik dan murah: Pilihan makanan sehat di kantin sangat terbatas, menyebabkan siswa tetap memilih jajanan kurang sehat; (d) Kurangnya edukasi kepada siswa dan orang tua: Penyuluhan tentang bahaya jajanan sembarangan belum dilakukan secara terprogram.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Putri & Susanto (2021) yang menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan kantin sehat adalah lemahnya sistem pengawasan dan edukasi gizi yang sistematis. Selain itu, sebagaimana diuraikan oleh Permana et al. (2019), pengelolaan kantin yang sehat memerlukan kerjasama antara pihak sekolah, pedagang, dan dinas kesehatan setempat.

Strategi Penguatan Kebijakan

Berdasarkan wawancara dan observasi, beberapa strategi yang disarankan untuk penguatan kebijakan penjualan makanan di lingkungan madrasah antara lain: (a) Merevisi kebijakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa dan pedagang, agar kebijakan lebih diterima dan dilaksanakan dengan komitmen bersama; (b) Membentuk tim pengawas internal dari unsur guru, UKS, dan OSIS untuk memantau jenis makanan secara rutin; (c) Mendorong penyediaan makanan sehat berbasis lokal, seperti kue tradisional sehat, buah potong lokal, dan minuman herbal ringan; (d) Mengintegrasikan pendidikan gizi dalam kurikulum atau kegiatan ekstra, agar siswa memiliki kesadaran dan literasi gizi yang lebih baik; € Mengadakan pelatihan atau workshop bagi pedagang dan pengelola kantin tentang standar makanan sehat, kebersihan, dan inovasi menu.

Strategi ini relevan dengan pendekatan *Health Promoting School* yang dikembangkan WHO (2016), di mana sekolah menjadi agen promosi kesehatan melalui pendidikan dan lingkungan yang mendukung perilaku sehat. Dalam

konteks madrasah, nilai-nilai Islami tentang makanan halalan thayyiban juga dapat diintegrasikan dalam penguatan kebijakan, sebagaimana disarankan oleh Rahmah (2021).

Secara umum, kebijakan penjualan makanan di Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo sudah ada dalam bentuk aturan internal, namun belum dijalankan secara efektif dan konsisten. Jenis makanan yang dijual mayoritas belum memenuhi standar gizi dan kesehatan. Kurangnya edukasi, pengawasan, dan partisipasi menjadi faktor utama lemahnya implementasi. Agar kebijakan menjadi lebih efektif, perlu penguatan dari sisi regulasi, pelibatan aktor kunci, penyediaan alternatif makanan sehat, serta pembudayaan literasi gizi kepada seluruh warga sekolah. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pola konsumsi juga dapat memperkuat arah kebijakan yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga bernilai spiritual.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penjualan makanan di lingkungan Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Kebijakan tersebut telah dirumuskan dalam bentuk surat edaran internal yang memuat aturan dasar mengenai jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dijual, waktu operasional kantin, serta ketentuan kebersihan dan keamanan pangan.

Namun, pada tataran implementasi, masih ditemukan berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Di antaranya adalah lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya partisipasi aktif dari pedagang dan siswa, serta rendahnya literasi gizi di kalangan siswa dan orang tua. Jenis makanan yang dijual sebagian besar masih didominasi oleh jajanan yang tidak sehat, rendah gizi, dan mengandung zat tambahan pangan yang berisiko bagi kesehatan.

Partisipasi para pemangku kepentingan, khususnya siswa dan pedagang, juga masih minim karena kebijakan cenderung dibuat secara top-down tanpa proses dialog dan sosialisasi yang optimal. Akibatnya, kepatuhan terhadap aturan masih rendah dan upaya menciptakan kantin sehat belum maksimal.

Meskipun demikian, ada kesadaran dari pihak madrasah untuk terus memperbaiki kebijakan tersebut, di antaranya dengan melakukan pembinaan terhadap pedagang, menggandeng UKS, dan menyisipkan edukasi gizi dalam

kegiatan pembelajaran. Madrasah juga menyadari pentingnya keterlibatan seluruh komponen sekolah, termasuk komite, guru, siswa, dan orang tua dalam mendukung terciptanya lingkungan konsumsi yang sehat dan aman di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Revitalisasi Kebijakan Penjualan Makanan

Madrasah perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan yang sudah ada dengan mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan yang partisipatif dan kontekstual lebih berpotensi untuk dipatuhi dan dijalankan secara berkelanjutan.

2. Penguatan Edukasi Gizi dan Literasi Konsumsi Sehat

Edukasi tentang makanan sehat sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum, kegiatan UKS, atau melalui pendekatan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Penyuluhan berkala bagi orang tua dan siswa sangat penting untuk membentuk kesadaran konsumsi makanan yang sehat sejak dini.

3. Pemberdayaan Pedagang Sekolah

Pedagang kantin perlu dilibatkan dalam pelatihan mengenai penyediaan makanan sehat, pengolahan bahan pangan secara higienis, dan strategi pemasaran makanan sehat yang menarik bagi siswa. Dinas kesehatan atau lembaga terkait dapat diajak bekerja sama untuk mendampingi program ini.

4. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Dibentuknya tim pengawas yang terdiri dari guru, UKS, OSIS, dan komite sekolah dapat memperkuat mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan. Evaluasi rutin setiap semester dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan secara bertahap.

5. Penyediaan Alternatif Makanan Sehat yang Terjangkau

Madrasah perlu mendorong inovasi penyediaan makanan sehat yang sesuai dengan selera siswa namun tetap terjangkau. Misalnya dengan mengadopsi makanan lokal, buah-buahan segar, atau camilan bergizi lainnya yang dapat dijadikan pilihan menarik.

6. Integrasi Nilai-Nilai Islami dalam Konsumsi Makanan

Sebagai lembaga pendidikan Islam, penting bagi madrasah untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam pola konsumsi siswa, seperti memilih makanan yang

halalan thayyiban, menjauhi makanan yang berbahaya, serta menjaga kebersihan dan keadaban dalam membeli dan mengonsumsi makanan.

7. Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal

Untuk penguatan kebijakan dan sumber daya, madrasah dapat membangun kerja sama dengan instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, BPOM, atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dengan perbaikan pada aspek regulasi, edukasi, partisipasi, dan pengawasan, kebijakan penjualan makanan di Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Gorontalo diharapkan dapat menjadi model kebijakan kantin sehat berbasis madrasah yang efektif dalam mendukung pembentukan generasi muda yang sehat secara jasmani, rohani, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson Education.
- Fauziah, N., & Kurniawati, E. (2020). Faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan tidak sehat oleh remaja. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 15(1), 37–45.
<https://doi.org/10.25182/jgp.2020.15.1.37-45>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Nurhayati, D. (2018). Pendidikan gizi dalam perspektif Islam: Integrasi nilai-nilai gizi dan aqidah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 89–98.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2018.61.89-98>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.

- Permana, A. S., Towolioe, S., & Yuliana, M. (2019). Pengawasan keamanan pangan di kantin sekolah. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(1), 55–64. <https://doi.org/10.20473/jkl.v11i1.2019.55-64>
- Putri, E. W., & Susanto, H. (2021). Implementasi kantin sehat sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular pada remaja. *Jurnal Promkes*, 9(2), 119–126. <https://doi.org/10.20473/jpk.V9.I2.2021.119-126>
- Rahmah, N. (2021). Implementasi nilai Islam dalam pemilihan makanan *halalan thayyiban* di sekolah Islam. *Jurnal Tarbiyatuna*, 12(2), 151–162. <https://doi.org/10.21043/tarbiyatuna.v12i2.11620>
- Shepherd, R. (2008). Influence of personal and social factors on food choice. *Nutrition Research Reviews*, 15(1), 1–8. <https://doi.org/10.1079/NRR200131>
- Subarsono, A. G. (2020). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Gava Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, S., Safitri, N., & Haris, M. (2022). Partisipasi siswa dalam penerapan kebijakan kantin sehat di sekolah menengah atas. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 102–111. <https://doi.org/10.17509/jakp.v14i2.44647>
- WHO. (2016). *What is a health promoting school?* World Health Organization. <https://www.who.int/health-promoting-schools>